

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Perkembangan Inflasi di Provinsi Lampung pada Triwulan II Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Bulan April 2025 tercatat mengalami inflasi sebesar 1,19% (mtm), lebih rendah dibandingkan periode Maret 2025 yang mengalami inflasi sebesar 1,96% (mtm). Realisasi tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan inflasi nasional sebesar 1,17% (mtm) dan lebih rendah dibandingkan rata-rata tingkat perkembangan IHK di Provinsi Lampung pada bulan April dalam 3 (tiga) tahun. Inflasi tersebut disebabkan oleh berlanjutnya kenaikan harga pada kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga. Sejalan dengan itu kenaikan harga komoditas makanan juga berperan dalam inflasi bulan April 2025. Komoditas utama penyumbang inflasi tertinggi adalah tarif listrik, cabai merah, tomat, emas perhiasan, dan bawang putih dengan andil masing-masing sebesar 0,87%; 0,18%; 0,11%; 0,11%; dan 0,06% (mtm) terakhir yang tercatat mengalami inflasi sebesar 0,38% (mtm)
- b. Bulan Mei 2025 tercatat mengalami deflasi sebesar -0,58% (mtm), lebih rendah dibandingkan periode April 2025 yang mengalami inflasi sebesar 1,19% (mtm). Realisasi tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan deflasi nasional sebesar 0,37% (mtm) dan rata-rata tingkat perkembangan IHK di Provinsi Lampung pada bulan Mei dalam 3 (tiga) tahun terakhir yang tercatat inflasi sebesar 0,20% (mtm). Deflasi ini disebabkan oleh penurunan harga pada kelompok makanan, minuman dan tembakau. Adapun komoditas utama penyumbang deflasi adalah bawang merah, bawang putih, cabai merah, dan cabai rawit dengan andil masing-masing sebesar -0,25%; -0,13%; -0,11%; dan -0,08% (mtm).
- c. Bulan Juni 2025 tercatat mengalami inflasi sebesar 0,04% (mtm), lebih tinggi dibandingkan periode Mei 2025 yang mengalami deflasi sebesar 0,58% (mtm). Realisasi tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan inflasi nasional sebesar 0,19% (mtm) dan rata-rata tingkat perkembangan IHK di Provinsi Lampung pada bulan Juni dalam 3 (tiga) tahun terakhir yang tercatat inflasi sebesar 0,42% (mtm). Deflasi tersebut disebabkan oleh peningkatan harga pada kelompok makanan, minuman dan tembakau. Adapun komoditas utama penyumbang inflasi adalah beras, cabai rawit, bawang merah, tomat, dan daging ayam ras dengan andil masing-masing sebesar 0,06%; 0,04%; 0,04%; 0,04%; dan 0,03% (mtm).

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

1. Peningkatan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 6,5% yang diimplementasikan secara bertahap sepanjang tahun 2025 diproyeksikan akan mendorong pertumbuhan permintaan agregat
2. Harga emas dunia yang terus meningkat karena adanya ketidakpastian situasi geopolitik dan sentimen terhadap kebijakan ekonomi Amerika Serikat
3. Peningkatan harga beras pasca berakhirnya periode panen raya (Maret - Juli 2025);
4. masuknya periode musim kemarau mulai Juni 2025 berpotensi menyebabkan tidak optimalnya produksi tanaman pangan dan hortikultura.
5. Tingginya intensitas hujan dan kejadian bencana alam banjir pada awal tahun berisiko mengganggu produksi komoditas tanaman, termasuk hortikultura.
6. Permintaan bahan makanan meningkat seiring dengan dimulainya pelaksanaan

kebijakan makan bergizi gratis (MBG).

7. Kenaikan harga angkutan udara berlanjut seiring dengan penyesuaian harga setelah berakhirnya kebijakan PPN DTP pada periode HBKN Idul Fitri sebelumnya, serta didorong oleh meningkatnya permintaan selama HBKN Idul Adha dan banyaknya hari libur pada Mei 2025.
 8. kenaikan harga bahan bakar minyak seiring kenaikan harga minyak dunia akibat meningkatnya tensi geopolitik di Timur Tengah dan potensi pemberlakuan kebijakan tarif baru AS.
3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Kebijakan pengendalian inflasi yang telah dilakukan di Provinsi Lampung pada Triwulan II Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Keterjangkauan Harga:

- a. Melakukan **pemantauan harga** bahan pangan dan bahan penting lainnya pada 15 Kabupaten/Kota;
- b. Melakukan operasi pasar secara terarah dan sesuai target.
- c. Melakukan monitoring harga dan pasokan, khususnya pada komoditas yang berisiko mengalami kenaikan harga seperti tomat, bawang merah, bawang putih, dan bayam.
- d. Impementasi Toko Pengendalian Inflasi
- e. Penyaluran **bantuan sosial**
- f. Pengembangan kapasitas UMKM/Pelaku Usaha

2. Ketersediaan Pasokan:

- a. Neraca Pangan guna memantau ketersediaan pasokan.
- b. Penyerapan/pengadaan gabah beras oleh BULOG dari petani lokal per tanggal **4 Juli 2025** yaitu:
 - GKP = **220.843,1 Ton**
 - Beras = **21.183,7 Ton**
 - Setara Beras = **139.069,8 Ton**
- c. Peningkatan produksi pertanian:
 - Penyediaan benih unggul
 - Melakukan pengawasan ketersediaan, penyaluran dan realisasi pupuk bersubsidi.
 - Pengelolaan dan rehabilitasi alokasi air irigasi.
 - Melakukan optimalisasi peran bendungan dan pompanisasi.
 - Mendorong pemanfaatan alsintan oleh petani.
 - Penguatan hilirisasi sektor pertanian melalui penerapan **pupuk organik cair** dan **alat pengering (dryer)**.
 - Pengawasan dan Pengendalian Distribusi Gabah dalam rangka Pengendalian Inflasi di Provinsi Lampung.

- d. Melakukan kerjasama dengan daerah penghasil komoditi bahan pangan.
- e. Pengembangan kawasan komoditi cabai dan bawang merah.
- f. Mendorong ketahanan pangan keluarga (gerakan tanam cabai, long-yam,dll) .
- g. Tim Satgas dan Monitoring BBM, LPG bersubsdi Provinsi Lampung melakukan monitoring di SPBU, agen dan pangkalan.

3. Kelancaran Distribusi:

- a. Penguatan kelancaran transportasi serta angkutan udara, darat, dan laut melalui koordinasi dan sinergi untuk memastikan kecukupan kapasitas dan jumlah moda transportasi untuk menjaga lalu lintas angkutan barang dan manusia.
- b. Penguatan kapasitas transportasi dengan penambahan volume penerbangan Lampung – Jakarta dan penyampaian substansi koordinasi kepada Pemerintah Daerah untuk reaktivasi rute penerbangan Lampung – Bali dan Lampung – Jogja.
- c. Penyampaian substansi koordinasi kepada Pemerintah Daerah untuk memprioritaskan perbaikan jalan Kabupaten/Kota dan Pedesaan yang dilalui oleh angkutan barang bahan pangan.
- d. Penguatan implementasi Mobil TOP (Transportasi Operasi Pasar) dalam menjaga kelancaran operasi pasar.

4. Komunikasi Efektif:

- a. Koordinasi secara rutin mengikuti rakor inflasi yang dilaksanakan secara virtual oleh Kementerian Dalam Negeri RI dan selanjutnya dilaksanakan Rapat Teknis TPID Provinsi Lampung dan selanjutnya dilaksanakan Rapat Teknis TPID Provinsi Lampung.
- b. Komunikasi efektif melalui Posko Inflasi Digital Provinsi Lampung
- c. Pemanfaatan media massa, media sosial dalam penyampaian informasi pengendalian inflasi.
- d. Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor 89 Tahun 2025 Tentang Gerakan Tanam Cabai dan Bawang Merah dalam Upaya Pengendalian Inflasi, yang ditujukan kepada Kepala Daerah se-Provinsi Lampung.
- e. Surat Sekretaris Daerah Nomor 500/3175/04/2025 Perihal Dukungan dan Peran Serta TP-PKK Dalam Pengendalian Infasi, kepada Ketua TP-PKK Provinsi Lampung.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

- 1. Evaluasi efektivitas operasi pasar dan Toko Pengendalian Inflasi perlu dilakukan secara berkala agar benar-benar menjangkau masyarakat.
- 2. Memastikan realisasi program tepat waktu dan tepat sasaran, serta peningkatan efisiensi dalam pengawasan distribusi komoditas.
- 3. Terus memperkuat edukasi publik berbasis data, termasuk penyampaian informasi harga secara transparan dan real-time.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Rekomendasi Kebijakan pengendalian Inflasi di Provinsi Lampung pada Triwulan II Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Keterjangkauan Harga:

- a. **Perluas jangkauan Toko Pengendalian Inflasi dan operasi pasar** ke daerah rawan inflasi dan daerah dengan akses terbatas terhadap pasar.
- b. **Perkuat akurasi dan frekuensi pemantauan harga** di pasar tradisional dan modern dengan pemanfaatan teknologi digital (dashboard harga real-time).

2. Ketersediaan Pasokan:

- a. **Perluas Kerjasama Antar Daerah (inter-kabupaten/kota maupun antarprovinsi)** untuk memperkuat stabilitas pasokan bahan pangan strategis.
- b. **Perkuat penggunaan neraca pangan daerah** secara berkala untuk proyeksi pasokan dan kebutuhan, serta sebagai dasar alokasi intervensi pasar
- c. **Percepat realisasi program pertanian seperti pupuk, benih, dan alsintan** melalui integrasi data antara dinas terkait dan kelompok tani

3. Kelancaran Distribusi:

- a. **Perluas penggunaan Mobil TOP (Transportasi Operasi Pasar)** untuk menjangkau wilayah terpencil, terutama saat HBKN.
- b. **Dorong percepatan perbaikan infrastruktur jalan distribusi pangan** melalui integrasi perencanaan dengan kabupaten/kota.

4. Komunikasi yang Efektif:

- a. Peningkatan kapasitas TPID melalui *Capacity Building*
- b. **Perkuat komunikasi publik berbasis data**, seperti infografis harga harian, tips belanja cerdas, dan edukasi pangan lokal alternatif
- c. Optimalkan fungsi Posko Inflasi Digital sebagai pusat informasi dan pengaduan harga
- d. **Evaluasi berkala efektivitas komunikasi melalui survei persepsi publik** terkait pengendalian harga dan ketersediaan pangan.